

HUBUNGAN AGAMA-NEGARA PASCA REFORMASI

M. Abdul Karim*

Abstract

Studying relations between the Religion (Islam) and the state in Indonesia always presented special characteristics. The Islam Religion has become deeply rooted in the Indonesian Moslem's inner self. The matter is how the state puts Islam in the dynamics of her government form. Until now, we have found Islam can afford to be soul and spirit for implementing changes toward the better ones. Islam spirit has been proved in the historical path of Indonesian nation that it was able to liberate herself from colonial domination, backwardness, and underdevelopment. Thus, in the relations between Islam as a religion institution and the state (government) as a constitutional policy holder don't to suspect each other, but they must be able to result in a new cosmos that is mutually profitable. They are no longer to exploit mutually, but to create harmonization for the sustained nation.

Kata kunci: *agama, negara, dan reformasi.*

I. Pendahuluan

Hubungan antara Agama dan negara selalu menarik untuk dikaji lebih mendalam dan serius. Hal ini karena seringkali muncul kasus perselingkuhan antara Agama dan negara yang berakibat buruknya tata konstitusional dan mandeknya sistem pemerintahan. Dalam banyak hal, agama menempati ruang yang dominan dan penting dalam kehidupan umat manusia. Akan tetapi dalam wilayah tertentu ia pun tidak akan harmoni jika dipaksakan untuk menjadi legitimasi kekuasaan sebuah negara.

* Dr. M. Abdul Karim, MA, MA adalah dosen tetap SPI Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam khazanah kesejarahan kita, sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah muncul negara-negara kerajaan yang sesungguhnya juga telah memiliki konstitusi tersendiri, misalnya Sriwijaya, Majapahit, dan Demak sampai Mataram. Kerajaan-kerajaan tersebut sudah semestinya memiliki aturan perundang-undangan sebagai rujukan kebijakan yang akan diambil oleh pemimpin kekuasaan (raja) untuk menjaga kedaulatan kerajaannya.

Setelah lepasnya Indonesia dari belenggu kolonialisasi, Portugis, Belanda, dan Jepang maka, pada awal kemerdekaan republik ini aturan konstitusi kita juga telah diperbincangkan oleh *founding fathers* republik. Mereka tidak hanya berhasil merumuskan Undang-undang Dasar akan tetapi juga berhasil pula merumuskan ideologi negara serta tata aturan lain yang dibutuhkan bagi republik yang masih belia tersebut. Di tengah gejolak revolusi yang masih berkobar, mereka dihadapkan pada aturan birokrasi ketatanegaraan yang harus dimiliki oleh negara yang merdeka dan berdaulat. Sekalipun beberapa produk perundangan masih merupakan peninggalan pemerintah Hindia Belanda, namun apa yang dihasilkan, memiliki makna yang luar biasa bagi konstitusi bangsa Indonesia.

II. Agama dan Negara Dalam Lintasan Sejarah

Tulisan berikut ini membahas hubungan antara agama (Islam) dan negara dalam lintasan sejarah nasional Indonesia. Perspektif tersebut tidak hanya bertujuan mengetahui peristiwa masa lalu yang berdasarkan atas informasi dari dokumen, prasasti, manuskrip, dan sumber pokok sebagaimana yang terdapat pada aliran historisisme yang dominan di Barat. Namun sebaliknya model *Historical Reductionism* mulai dijauhi oleh kajian sejarah kontemporer. Karena model ini mengamati peristiwa satu persatu tanpa memberikan makna, signifikansi atau hukum (sejarah). Pola ini lebih mengedepankan ruang daripada waktu, *discontinuance* daripada *continuation*.

Perspektif historis ini bukan sekedar mengamati berbagai peristiwa seolah-olah kita berada dalam museum, melainkan merupakan intensi, kesadaran kolektif yang dituangkan ke dalam kesadaran individual. Sejarah merupakan akar dan dasar bagi kesadaran. Ia bukan sekedar memori masa lalu, tapi alur dan hukum, semangat sejarah. Tujuannya adalah mengembangkan dan memperdalam kesadaran historis sebagai sarana untuk memperdalam kesadaran nasionalisme yang memberikan

pengalaman-pengalaman sejarah masa lampau untuk melihat masa kini dan beberapa faktor pembentuk historisnya.

Perjalanan sejarah agama Islam dan pergulatannya dengan kehidupan kebangsaan dikaji dan diinterpretasikan secara objektif. Masa kini sesungguhnya merupakan akumulasi dari masa lampau. Meskipun berbagai peristiwa terjadi dalam rangkaian waktu, *diachronism*. Akan tetapi hal tersebut mempunyai struktur, *synchronism*. Masa kini menerangi masa lampau melalui pemilihan objek dan penarikan kesimpulan. Relasionalitas masa lampau dengan masa kini terjadi hanya dalam satu kesadaran nasionalisme untuk memanifestasikan kontinuitas dalam kepribadian historis, untuk mengeksplorasikannya dan mengamati fase-fase dan alur-alur perkembangannya dalam sejarah.

Masa lampau juga dapat membaca masa kini karena masa lampau sebenarnya merupakan faktor pembentuk masa kini. Masa lampau bisa jadi lebih partisipatif pada masa kini daripada masa kini itu sendiri. Manusia ada dalam sejarah dan hidup di dalamnya sedemikian rupa sehingga kesadaran historis yang merupakan kesadaran atas masa lampau mendominasi kesadaran atas masa kini dan kesadaran atas masa depan. Oleh karena itu muncul gerakan-gerakan konservatif yang menyerukan kembali ke masa lampau sebagai satu-satunya jalan menuju kebangkitan masa kini dan mengejar masa depan.

A. Awal Masuknya Islam di Nusantara

Penyiaran agama Islam di Kepulauan Indonesia sejak abad XIII M dilakukan oleh para pedagang yang datang dari pantai Gujarat. Dari kenyataan itu dapat diduga bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia sudah tercampur dengan budaya Parsi dan India yang banyak dipengaruhi oleh aliran Syi'ah. Di Jawa Timur, terdapat upacara sedekah *sirr* yang dilaksanakan sesudah Isya hingga sebelum tengah malam, dengan membaca bacaan (tertentu) yang tujuannya untuk meminta keselamatan dengan *wasilah* kepada Syekh Abdul Qadir Jailani.¹ Ritual seperti itu jelas merupakan pengaruh dari murid-murid Abdul Qadir Jailani yang ada di pantai Gujarat secara khusus dan India secara umum.

¹ Muhammad Abdul Karim, "Pengaruh Islam Dalam Pembinaan Moral Bangsa di Indonesia: Telaah Akulturasi Budaya Islam – Indonesia" Disertasi S3 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), hlm.45-46.

Secara historis, Islam masuk ke Peureulak (Perlak) dan di pantai-pantai utara pulau Jawa melalui proses *mission sacré* yaitu proses *dakwah bi al-hal* yang dibawakan oleh para pedagang yang merangkap muballigh ataupun da'i. Ini menunjukkan bahwa para pembawa ajaran agama Islam ke Nusantara adalah para pekerja keras.

Kepribadian kaum muslim dengan *al-akhlaq al-karimah*, membuat masyarakat pribumi memilih agama Islam. Para penguasa menilai, ajaran-ajaran Islam bukan merupakan ancaman yang mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, ia memperkokoh ketahanan pemerintahan dan persatuan.

Praksis-praksis individual itu berangsur-angsur ditransformasikan ke dalam praksis-praksis kolektif. Setelah ada kerajaan-kerajaan yang rajanya menganut agama Islam, seperti di Demak dan Mataram II, pada hakekatnya yang bertindak sebagai penyebar-penyebar agama bukan raja itu sendiri, melainkan yang bergerak adalah *wali sanga* (kelompok tokoh-tokoh agama Islam). Mereka benar-benar menjadi penyebar-penyebar agama Islam di pulau Jawa. Karena pulau Jawa itu menjadi pusat pemerintahan Nusantara, baik pada zaman Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram I, maupun Mataram II, maka ketika Mataram I menjadikan agama Islam sebagai agama kerajaan, dengan sendirinya penyebaran Islam itu secara sistematis menyebar ke daerah-daerah.²

Kesultanan Demak atau Mataram II mengadakan ekspedisi-ekspedisi ke perbatasan-perbatasan atau hutan-hutan untuk menangkap para penjahat, agar keamanan dapat dipelihara. Ekspedisi-ekspedisi tersebut diperkuat oleh ahli-ahli agama, murid-murid dari para wali, yang bertindak sebagai penasihat militer yang sekarang hampir sama dengan imam tentara atau rohaniwan. Mereka menjadi penasehat-penasehat yang ampuh dan sekaligus sebagai pemelihara mental bala tentara, sehingga ekspedisi-ekspedisi tersebut berhasil dengan baik. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap agama baru itu semakin meningkat dan rakyat pun banyak yang memeluk agama baru itu.³

Media penyebaran agama Islam di Nusantara adalah perdagangan, tanpa *mission* dan tanpa kekuatan militer. Agama Islam masuk ke Indonesia

² Grosset & Dunlap, *The Travels of Marcopolo* (New York: t. th.), hlm. 249-250, Sayed Alwi B. Tahir al-Haddad, *Sejarah Perkembangan Islam di Timur Jauh*, terj. Dzyiah Shahab (Jakarta: al-Maktabah Addaimiah, 1957), hlm. 112-116, dan Thomas Arnold, *The Preaching of Islam: A History of Muslim Faith* (Lahore: Sh. Ashraf, Kashmiri bazar, cet.ii, 1965), hlm. 382-384.

³ Karim, "Pengaruh", hlm.46-48.

melalui perangkat budaya, justru ini yang sangat dominan, seiring dengan perkembangan agama itu sendiri di Nusantara. Dengan demikian proses yang ditempuh adalah proses *pénétration pacifique*, artinya perembesan secara damai, dan dapat dikatakan pula bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak didasarkan atas misi atau dorongan kekuasaan, namun berlangsung secara evolutif.

B. Islam pada masa Kolonial

Umat Islam Indonesia hidup dalam aneka ragam situasi dan kondisi semenjak agama Islam masuk ke Indonesia, karena agama Islam merupakan agama yang membuka alam pikiran manusia dalam mengenal hakekat Maha Pencipta dan hakekat manusia serta bagaimana manusia berhubungan dengan Maha Pencipta dan berhubungan dengan sesama manusia.

Ketika Belanda hendak menancapkan kekuasaannya di bumi Nusantara (1596 M), sudah mulai terasa akan kesulitan dalam menghadapi masyarakat Islam. Kolonial Belanda selalu menghadapi perlawanan gencar dari masyarakat Islam Indonesia seperti pertempuran di Banten, Hasanuddin di Ujung Pandang, perang Diponegoro, perang Padri, perang Aceh, dan sebagainya.⁴

V.O.C. (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) dan kolonial Belanda dengan politik *divide et impera* secara fisik dapat menguasai Nusantara, akan tetapi secara psikologis pemerintah Kolonial Belanda sama sekali tidak dapat menundukkan pribadi rakyat yang telah mempunyai jalan pikiran dan pegangan hidup itu. Islam dan semangatnya tetap berkembang di hati umat Islam, dan pendidikan Islam tetap berjalan di pesantren-pesantren meliputi daerah terbesar di Nusantara.

Sebagai cara untuk melemahkan kepribadian orang-orang Islam di Nusantara, Belanda dengan sengaja mengembangkan pendidikan-pendidikan ala Barat yang dianggap lebih dapat membimbing masyarakat ke taraf hidup yang baik, dan dijadikan kedok oleh Belanda untuk melancarkan politik penjajahannya. Perbedaan antara Barat dan Timur digambarkan oleh penyair Rudyard Kipling yang mencetuskan ide bahwa; pendidikan Barat lebih baik dari pada pendidikan Timur (*East is East and West is West and never, the Twin shall meet*). Di tiap-tiap lembaga pendidikan disebarluaskan

⁴ J .S. Furnival, *Hindia Belanda*, terjemahan Jonkheer Mr. A. C. D. De Graeff (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan PustakaKementerian Pelajaran Malaysia, 1983), hlm. 27-29 dan H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Beland* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 4-7.

perbedaan-perbedaan itu yang intinya orang Belanda itu rasional sedangkan orang Timur itu emosional. Tetapi ternyata setelah Jepang mengalahkan Rusia pada tahun 1905, Rusia dianggap mewakili Barat dan Jepang mewakili orang Timur. Maka timbullah kesadaran bagi masyarakat Indonesia bahwa semboyan yang lama itu menghantui pikiran mereka, hilang lenyap. Karena melihat realitas sejarah yang membuktikan kenyataan yang sebaliknya.⁵

Peristiwa yang menggugah kesadaran semangat bangsa Indonesia untuk menyongsong masa depan yang gemilang dikenal dengan “Kebangkitan Nasional”.

*“... the thunder of cannons in Fort Arthur, where the Japanese succeeded in blowing back the gigantic Russian attack, it was as if this thunder of victory waved to the eastern islands and overflowed the coasts of Indonesia”.*⁶

Perubahan sosial yang terjadi di Nusantara ialah bahwa perjuangan yang dilaksanakan secara kedaerahan, dianggap tidak efektif lagi dalam mengusir kekuasaan Belanda. Oleh karena itu perlu disusun suatu kekuatan yang mengikat potensi yang ada di seluruh tanah air. Kesadaran seperti ini dikenal sebagai kesadaran Nasional, yaitu kesadaran yang menggalang semangat kebangsaan yang meliputi daerah yang pernah digalang pada jaman Majapahit. Ide seperti ini terkenal dengan “*Indonesia Irredenta*” yaitu semua daerah yang berbahasa Melayu.

Sebenarnya ide ini timbul dari kalangan-kalangan terpelajar yang pernah dididik di negeri Belanda. Sementara itu pendidikan Barat ternyata kemudian melahirkan golongan nasionalis sekuler. Golongan ini bertemu dengan golongan Islam dalam rasa nasional, kemudian saling bahu membahu dalam memperjuangkan pembebasan tanah air mereka bersama, meskipun sering terjadi persaingan ketat antara keduanya.⁷

Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo seorang dokter dari Yogyakarta sebagai pendiri gerakan Budi Utomo, juga orang yang pertama mempropagandakan gerakan tersebut. Gerakan Budi Utomo dilancarkan melalui usaha badan wakaf sebagai wadah kegiatan untuk mengumpulkan beasiswa bagi putra-putra Indonesia yang ingin melanjutkan sekolah. Propaganda itu pada mulanya mendapat tantangan keras dari priyai-priyayi agung yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan mempunyai hubungan

⁵ Anton Timur Jailani, “The Background of Indonesia Nationalism”, *Mizan*, no.1, Vol.II, 1985, hlm. 23 dan *Masa Kini*, 20 Mei 1986, hlm. 1 dan 8.

⁶ Jailani, “The Background”, *Mizan*, hlm. 24.

⁷ Suminto, *Politik*, hlm. 5.

lebih dekat dengan Belanda serta mempunyai hak-hak yang istimewa. Namun di lain pihak gerakan ini mendapat dukungan oleh kalangan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Jakarta, yang hati mereka tersentak untuk membantu pergerakan menuju cita-cita yaitu; membina suatu perkumpulan yang dapat menggalang bangkitnya bangsa Indonesia. Di antara mahasiswa yang sangat simpati dan mendukung ide mas Wahidin ialah R. Soetomo dan Raden Gunawan Mangoenkoesumo.⁸

Pada tanggal 20 Mei 1908 bertepatan hari Minggu jam 9.00 WIB, berkumpul para pemuda di bangsal tingkat satu bagian kedokteran. Dr. Soetomo yang memberikan pengarahannya, dan disambut dengan tepuk tangan yang meriah, sehingga terbentuklah sebuah gerakan yang disebut gerakan Budi Utomo.⁹

Berdirinya Budi Utomo itu disamping mendapat sambutan dari sebagian penduduk Indonesia terutama di kalangan priyayi rendah, juga mendapat kritikan dari berbagai pihak dengan perasaan pesimis, karena pemimpin-pemimpin yang berasal dari keturunan bangsawan ningrat dan feodal tidak mungkin membela rakyat sepenuh hati. Mereka tidak dapat menghayati perasaan rakyat dan sangat kurang dalam praktek demokrasi. Dengan keadaan demikian, seorang jurnalis dari Solo terkenal dengan nama R. M. Tirtoadisoerjo mendirikan sebuah perseroan yang didasarkan pada corak dan ide baru yaitu SDI (Sarekat Dagang Islam) pada tahun 1909 di Jakarta. Dua tahun kemudian dibentuk cabangnya di Bogor. Perseroan SDI bercorak koperasi dengan tujuan untuk merobohkan monopoli saudagar-saudagar bangsa Tionghoa.¹⁰ Kemudian pada tahun 1911 organisasi ini terkenal dengan nama "Sarekat Islam" yang diketuai H. O. S. Tjokroaminoto, sedangkan ketua SDI mulanya adalah H. Samanhoedi. Kemudian kata "dagang" tidak

⁸ Lihat Notosusanto, *Sejarah*, Jilid V, hlm. 181, Chr. L. M. Penders, *Indonesia Selected Documents on Colonialism and Nationalism 1830-1942* (Queensland: Queensland University Press, 1977), hlm. 216-218, D. M. G. Koch, *Menuju Kemerdekaan Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia sampa 1942*, terj. Abdoel Moeis (Jakarta: Yayasan Pemabagunan, 1951), hlm. 23.

⁹ Lihat Koch, *Menuju*, hlm. 23 dan Pitut Soeharto, A, Zainal Ihsan, *Cahaya di Kegelapan Capita Selecta Kedua Boedi Oetomo dan Sarekat Islam* (Jakarta: Jaya sakti, 1981), hlm. 36-37.

¹⁰ Muhammad Abdul karim, "Peranan Pslam dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia", Tesis S2 (Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 1986), hlm.30-31 dan Mukayat, *Haji Agus Salim Karya dan Pegabdiannya* (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah National, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), hlm. 25-28.

disebut-sebut lagi.¹¹

Dalam catatan sejarah terdapat dua versi tentang detik-detik berdirinya “Kebangkitan Nasional”. Satu pihak mengatakan pada hari berdirinya nasionalis berdasarkan Islam, sedangkan di lain pihak menekankan pada nasionalis murni.

Pihak pertama meletakkan titik awal “Kebangkitan Nasional” ini, pada saat berdirinya SDI pada tanggal 16 Oktober 1905, dengan alasan bahwa meskipun para pendirinya orang-orang Islam dan asasnya Islam, akan tetapi gerak dan perjuangannya bertujuan untuk menyatukan bangsa Indonesia melawan kolonialisme secara bertahap. Perjuangan untuk mengklaim berdirinya SDI sebagai Kebangkitan Nasional dipelopori oleh sekelompok kecil orang-orang Islam yang diwakili Tamar Djaja.¹²

Pihak kedua yang meletakkan titik awal “Kebangkitan Nasional” ini pada detik-detik berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dipelopori oleh pihak-pihak yang melandaskan perjuangan penyatuan bangsa-bangsa yang bersifat nasional, yang kebanyakan meletakkan titik permulaan sejarah kebangkitan Nasional Indonesia dari zaman Majapahit,¹³ yaitu dari sejak terciptanya kata Nusantara yang menjadi ide atau tujuan dari “Sumpah Maha Patih Gajahmada”, pada saat mengemukakan Sumpah Palapa.

Golongan ini melandaskan perjuangan kemerdekaan Indonesia, dengan pernyataan bangsa dan bahasa semata-mata berlandaskan atas asas nasionalis murni. Mereka inilah yang mendapat simpati dari pemerintah Indonesia baik dari zaman Orde Lama maupun Orde Baru, dan ini ditetapkan secara resmi pada tanggal 20 Mei 1948, demikian juga dapat dilihat dalam buku pelajaran di sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, ketentuan ini yang diikuti.¹⁴

¹¹ Koch, *Menuju*, hlm. 26-27, dan W. F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition A Study of Social Change*, vol. II., cet. II (Bandung: Sumur Bandung, 1956), hlm. 58-59.

¹² Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1973), hlm. 114-115 dan A. P. E. Koeber, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil ?*, (Jakarta: PT Temprint, 1985), hlm. 11

¹³ Ali Martopo, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1978), hlm. 16-17, 28-31, 34, 44, dan 60-61, Soeroto, *Indonesia di Tengah Dunia dari Abad ke Abad II*, cet. IV (Jakarta: PT Jambatan 1961), hlm. 161-169 dan Departemen Penerangan RI, *Hari-hari bersejarah dan Peristiwa-peristiwa Penting* (Jakarta: Daya Upaya, 1963), hlm. 20.

¹⁴ Karim, “Peranan”, hlm. dan James Hastings, *Encyclopedia of Religion and Etchs*, vol. II (New York: Charles Scibner’s Sons, T.T.), hlm. 767-768, dan Soeroto, *Indonesia di Tengah-tengah Dunia dari Abad ke Abad*, II (Jakarta: P T Jambatan, 1961), hlm. 161-169

Terlepas dari perbedaan pendapat di antara dua kelompok, penulis berpandangan bahwa kebenaran sejarah dapat dipisahkan dengan subjektif manusia dan kondisi yang meliputinya. Seandainya negara Republik Indonesia ini sejak diproklamasikannya disepakati oleh seluruh rakyat sebagai negara yang berasaskan Islam, tentulah yang terpilih sebagai “Kebangkita Nasional” ialah hari berdirinya partai politik yang didasarkan pada Nasionalis Islam yaitu pada tanggal 16 Oktober 1905. Tetapi kondisi tidaklah menunjukkan demikian, yang terjadi ialah bahwa rakyat Indonesia bersepakat untuk mendirikan negara RI yang didasarkan pada perjuangan nasionalis murni, sehingga yang terpilih ialah hari berdirinya Budi Utomo yaitu partai yang berasaskan Nasionalis murni pula yaitu pada tanggal 20 Mei 1908.

Sekarang dapat kita lihat bahwa ajaran Islam yang dianut bangsa Indonesia, telah mengikat dan memberikan dorongan untuk kebulatan tekad. Mereka berjuang melalui partai untuk memperoleh kemerdekaan, meskipun mereka berbeda-beda dalam corak dan ragam perjuangannya. Akan tetapi dalam semangat yang sama, yaitu terbebasnya dari belenggu kolonialisme dan imperialisme asing.

C. Islam Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi

Selama era pemerintahan Presiden Soekarno, tidak banyak hal yang bersinggungan secara langsung antara agama dan negara. Dalam kondisi masa pancaroba yang serba sulit di era revolusi fisik tersebut, para pemimpin bangsa ini cukup arif dalam menempatkan agama dalam kehidupan berbangsa.

Tercatat paling tidak hanya kiprah Masyumi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama', dan beberapa ormas Islam yang pada saat itu tetap dibiarkan berproses di jalur kultural. Pemerintahan pertama setelah kemerdekaan itu juga berhasil membentuk Departemen Agama yang berfungsi membantu umat beragama untuk menjalankan proses peribadahan. Departemen Agama tidak bermaksud mengintervensi umat beragama dalam hubungannya dengan Sang Pencipta.

Dalam perkembangan berikutnya pemerintahan Orde Baru yang mengkampanyekan pada rakyat Indonesia untuk menegakkan supermasi hukum dalam tata kenegaraan berdasarkan konstitusi yang ada yaitu Pancasila dan UUD 1945, ternyata di pihak lain justru melakukan pembodohan bagi rakyat. Rezim totalitarisme Orde Baru tanpa sadar atau

bahkan disengaja melakukan praktek pemerintahan yang tidak berdasarkan konstitusi. Dengan dalih demi keamanan dan ketertiban serta terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional, mereka menggunakan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Termasuk pula mengingkari aturan-aturan dalam konstitusi kita.

Akan tetapi memang tidak ada perselingkuhan yang kentara antara Orde Baru dengan agama. Namun demikian kekhawatiran negara saat itu dengan komunitas muslim moderat (Nahdlatul Ulama) yang berkembang begitu pesat menimpulan kegundahan yang serius. Kritik masyarakat Islam terhadap recim militer ini akhirnya direspon dengan mendirikan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) guna memfasilitasi kelompok Islam yang pro-negara. Akan tetapi pertentangan tersebut tidak berimbas pada masyarakat akar rumput.

Puncak dari kebobrokan sistem ketatanegaran kita pada masa Orde Baru adalah ketika dikeluarkannya kebijakan untuk melangsungkan sistem ekonomi liberal. Maka yang dihasilkan ternyata adalah ketidaksiapan kemampuan bangsa kita untuk mengikuti arus tata perekonomian global, maka yang dilahirkan adalah krisis perekonomian, yang pada gilirannya membawa dampak pada krisis dalam bidang lain yang semakin menggurita. Kompleksitas persoalan bangsa menjadi semakin rumit manakala produk peraturan pemerintah sebagai turunan dari perundang-undangan primer (Pacasila dan UUD 1945) ternyata banyak melakukan penyimpangan. Di samping itu di barengi pula dengan kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak populis dan merakyat, sehingga ketimpangan ekonomi semakin besar. Akibatnya proses munculnya gelombang ketidakpercayaan masyarakat semakin kuat dan mendorong terjadinya reformasi.

Pada era reformasi ketidakjelasan 'kelamin' konstitusi kita semakin menjadi. Indikasi ini berawal ketika tuntutan amandemen terhadap UUD 1945, dilaksanakan oleh para wakil rakyat. Padahal sesungguhnya yang justru perlu dibenahi adalah aturan-aturan yang berada dibawah UUD misalnya peraturan pemerintah, kebijakan presiden keputusan menteri dan lain sebagainya. Karena di sanalah sesungguhnya *biang kerok* dari persoalan bangsa. Jadi tanpa harus melakukan amandemen terhadap UUD 1945, jika amandemen yang dijadikan pilihan maka, justru ketidakpercayaan terhadap konstitusi tersebut pada masa yang akan datang juga akan timbul. Kepentingan kelompok yang berkuasa akan sangat menentukan kebijakan berubahnya UUD 1945 yang agung tersebut.

III. Sketsa Corak Hubungan Agama dan Negara

Pelajaran dan pengalaman dari sejarah di masa lampau, serta kenyataan dari pada kondisi masyarakat Indonesia, tidak lepas dari perhatian untuk menyusun falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila.

Dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha Kemerdekaan (*Dokuritsu Zyunbi Tyosakai*) yang beranggota 60 orang, pertama mulai rapat pada tanggal 29 Mei 1945, Bung Karno diminta sumbangan buah pikirannya untuk menentukan dasar falsafah negara (*philosofischegronslag*) dari negara yang akan dimerdekakan.¹⁵

Berkat kebijaksanaan dan pandangan yang jauh ke depan mendahului generasi zamannya, Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 telah mengemukakan hasil galiannya yang terdapat dari bumi Indonesia sendiri berupa "Pancasila". Seperti diketahui kelima sila dari pada Pancasila itu ialah; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Perikemanusiaan, Kedaulatan Rakyat, dan Keadilan Sosial.¹⁶

Sidang kedua dari BPUK yang dilakukan dari tanggal 10 sampai 16 Juli, beracara merumuskan naskah UUD. Sidang ini berhasil menyusun dua hal, yaitu Pembukaan dan Batang-tubuh Undang-Undang Dasar. Untuk pembukaan UUD digunakan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan, di antaranya:

"...Berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syaria'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab", diganti dengan: " berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ..."¹⁷

Selanjutnya sejarah pembentukan falsafah negara Indonesia tidak diuraikan secara detail, mungkin pada kesempatan lain kita akan bicarakan nilai-nilai serta inti dari setiap sila yang merupakan refleksi dari prinsip-prinsip ajara Islam. Yakni umat Islam telah melakukan asaz-asaz yang Islam yang sangat penting bagi dasar negara, terbukti bahwa sebagian prinsip-prinsip al Qur'an telah tertuang dalam Pancasila. Di sini penulis hanya akan menjelaskan dan menanggapi mengenai terhapusnya "tujuh kata" dari Piagam Jakarta.

¹⁵ Solichin Salam, *Bung Karno Putra Faja*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982) hlm. 97 dan Ariwiad, *Ichtsar Sejarah Nasional Indonesi*,(Jakarta: departemen Keamanan Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971), hlm. 99.

¹⁶ Salam, *Bung*, hlm. 97.

¹⁷ Ariwiadi, *Ichtsar*, hlm. 99.

Kemerdekaan yang ditanamkan dalam Islam, bukan hanya kemerdekaan individual maupun kolektif dan pemerintahan, tetapi kemerdekaan yang sangat tinggi harganya yaitu kemerdekaan universal dalam kaitan antara diriya dengan alam semesta.¹⁸ Inilah prinsip-prinsip yang memberikan gelora dan semangat juang yang tinggi bagi Muhammad saw. beserta pengikut-pengikutnya, sehingga mampu mengubah kehidupan padang pasir yang liar, buas, dan kejam menjadi masyarakat yang diliputi ketentraman, kedamaian, dan kemerdekaan abadi. Ini pulalah model perjuangan yang mengilhami serta memperkuat kaum muslim Indonesia, berjuang untuk meretas soverinitas yang dipaksakan dari jalan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh orang-orang Belanda dengan berkedok atas dasar prinsip *mission sacré*.¹⁹

Dari kilasan sejarah Rasul, tampak adanya kegigihan untuk membentuk masyarakat Islam yang mampu membina peribadatan, kemaslahatan bersama, dan menggambarkan nilai-nilai bersama dengan jalan musyawarah untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan sejahtera di akherat. Atas dasar keyakinan yang diwahyukan terbebas dari tekanan dan paksaan dari manapun juga selain Allah. Prinsip-prinsip inilah yang mendorong umat Islam untuk memadukan pikiran, memperkuat persatuan, dan menggerakkan kemerdekaan yang dikandung sebagai syarat mutlak bagi terbentuknya kemaslahatan hidup, pengembangan pikiran, dan pelestarian budaya bangsa sesuai dengan bimbingan yang terdapat dalam al- Qur'an dan Sunnah Nabi.

Memang kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia bukan semata-mata perjuang seluruh rakyat, tetapi juga merupakan limpahan rahmat dari Allah Swt, seperti disebutkan dalam *Mukadimah UUD 45*.²⁰ Dalam hubungan beraneka ragam agama dan seluruh kekuatan politik, umat Islam telah merasa puas dengan dicantumkannya "Ketuhanan Yang Maha Esa" saja dalam UUD 45,²¹ meskipun umat Islam telah dengan sukarela menghapuskan

¹⁸ Q S 18 (al-Kahfi):110, 17 (al-Isra'):110 dan 41(al- Fusilat):53.

¹⁹ Suminto, *Politik*, hlm. 19, 23-48, Noer, *Gerakan*, hlm. 28-31, Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, terj. S. Gunawan, Taufik Abdullah, Kata pengantar (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, hlm. 1-8, dan Hamid al-Gadri, *C. Snouck Hurgronje Politik Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Ara* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 95-99.

²⁰ Team Pembinaan Penatar dan Bahan-Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Garis-Garis Besar Haluan Negara*(Jakarta, 1978), hlm. 1.

²¹ Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Wilayah Kajian Agama di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982), hlm. 138-139 dan B. J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971), hlm. 27, Ariwiadi, *Ichtiisar*, hlm. 99

“tujuh kata” pada sila pertama seperti yang termuat dalam *Jakarta Charter*, tiada lain hanyalah memelihara keutuhan dan persatuan bangsa dengan kesadaran penuh bahwa bersatu itu wajib. Hal ini umat Islam Indonesia telah memahami akan arti persatuan sebagai syarat mutlak bagi terbentuknya kemaslahatan seperti halnya *The Charter of Madinah* yang dibuat oleh Rasul,²² karena adanya suatu pertimabnag bahwa “sesuatu yang tidak dapat dicapai seluruhnya tidak boleh ditinggalkan”.

Kemaslahatan umum di sini ialah menegakkan berdirinya negara RI yang berdaulat dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyaratan yang dibimbing oleh hikmah kebijaksanaan dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah prinsip-prinsip yang dapat ditampung kebenarannya oleh al Qur’an dan Sunnah juga memberikan landasan yang kuat bagi terlaksananya ajara-ajaran Islam. Adapun kemaslahatan khusus ialah ciata-cita kaum muslim untuk membentuk masyarakat yang seutuhnya diatur oleh al-Qur’an dan Sunnah.

Di sinilah letak ketinggian moral umat Islam dalam perjuangannya mengisi kemerdekaan, juga benar-benar mampu mengendalikan dirinya. Mereka tidak ambil; peduli pada bentuk kenegaraan, melainkan mereka mengharapkan ajaran Islam dapat hidup dan berlangsung di tanah air tanpa gangguan dan rintangan. Itulah sebabnya ketika diungkapkan UUD 45, umat Islam tidak mempersoalkan istilah Republik Indonesia. hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Islam Indonesia tidak berniat mendirikan negara Islam, karena Islam tidaklah memberi bentuk tertentu terhadap wujud suatu negara, asalkan negara itu menjunjung tinggi amanah yang diberikan dan menjalankan prinsip musyawarah.

Pemikiran serupa ini adalah merupakan refleksi pemikiran yang berinteraksi dengan bimbingan al-Qur’an dan Sunnah. Sehingga terlihatlah faktor-faktor yang sangat penting dari kilasan pemikiran kaum muslim bagi usaha tercapainya kemerdekaan Indonesia, sehingga terbetuklah negara republik yang berdaulat yang mempunyai wawasan dan strategi bangsa-bangsa di bawah kolong langit ini.

Spiritualitas Islam tidak terlepas dari komitmen solidaritas dan emansipasi sebagai ukuran kebenaran. *Pertama*, sebagai ukuran kebenaran harus mampu membebaskan manusia dari belenggu-belenggu zamannya

²² Lihat Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik II Konsep Politik dan Ideologi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977) hlm. 173-179 juga Muhammad Hamidullah, , terj. A. Chotib, *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: Bula Bintang, 1974), hlm. 25-27.

dan status quo, dan mengentaskannya dari ketertindasan, kebodohan, dan eksploitasi-eksploitasi struktural maupun kultural. *Kedua*, solidaritas sebagai ukuran kebenaran artinya kebenaran Islam harus mampu mengeluarkan dan membebaskan manusia dari lingkaran-lingkaran ideologis yang sempit, keras, dan bermusuhan menuju kehidupan dialogis yang penuh dengan kedamaian dan tanpa kecurigaan.

Kondisi yang demikian itu akan membawa peradaban manusia menuju peradaban yang beretos produktif, dinamis dan progresif. Ini berarti bahwa latar keimanan agama yang plural akan senantiasa bertemu pada tingkat kehidupan riil. Mereka, misalnya, akan bertemu dalam perjuangan (*jihad*) melawan realitas struktur sosio-kultural yang menindas, otoriter, tidak adil, mengeksploitasi, dan sebagainya dengan melakukan proyek-proyek yang berorientasi perubahan menuju struktur sosio-kultural yang egaliter, demokratis, adil, dan damai.

IV. Penutup

Hubungan antara agama dan negara telah melalui proses panjang dan melelahkan. Sejak awal masuknya Islam di Indonesia telah tercipta sistem keterpaduan antara agama dan sistem kemasyarakatan (baca: budaya) yang ada. Hal tersebut menjadi modal berharga bagi kelangsungan proses kenegaraan bangsa ini pada era mendatang.

Pola hubungan untuk tidak saling mecurigai dan memanfaatkan satu sama lain begitu penting bagi negara ini. Agama sudah semestinya di letakkan pada wilayah yang sakral terhormat. Sudah sepatutnya agama menjadi spirit bagi setiap perjuangan dan perubahan menuju sesuatu yang lebih baik.

Agama tidak perlu memosisikan diri dan campur tangan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil negara. Hal ini menjadi sebuah kemunduran layaknya yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan. Legitimasi gereja menjadi alat kontrol atas kebijakan negara. Dengan demikian yang dominan adalah campur tangan agama atas negara, sehingga agama menjadi momok dan tidak sakral lagi.

Ke depan, bangsa Indonesia harus terus mampu menempatkan Agama di tengah kondisi kebangsaan, berada pada mestinya. Jangan sampai terjadi blunder politik yang mengakibatkan kehancuran bangsa ini, karena diakibatkan agama dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Kemandirian dan ketegasan pemimpin Indonesia mendatang menjadi sesuatu yang berharga bagi republik ini.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Zainal Abidin. 1977. *Ilmu Politik. I: Konsepsi Politik dan Ideologi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ariwiadi. 1971. *Ichtisar Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Departemen Keamanan Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI.
- Arnold, Thomas. 1965. *The Preaching of Islam: A History of Muslim Faith*. Lahore: Sh. Ashraf, Kashmiri bazar, cet.ii.
- Boland, B. J. 1971. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Departemen Penerangan RI. 1963. *Hari-hari Bersejarah dan Peristiwa-peristiwa Penting*. Jakarta: Daya Upaya.
- Dunlap, & Grosset. 1957. *The Travels of Marco Polo*. New York: tp.
- Al-Haddad, Sayed Alwi B. Tahir. tt. *Sejarah Perkembangan Islam di Ttimur Jauh*. Terj. Dzyiah Shahab. Jakarta: al-Maktabah Addaimiah.
- Furnival, J. S. 1983. *Hindia Belanda*. Terj. Jonkheer Mr. A. C. D. De Graeff. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Al-Gadri, Hamid C. 1984. *Snouck Hurgronje Politik Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Hamidullah, Muhammad. Terj. A. Chotib. 1974. *Pengantar Studi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hastings, James. tt. *Encyclopedia of Religion and Etchs*, Vol. II. New York: Charles Scibner's Sons.
- Hurgronje, Snouck *Islam di Hindia Belanda*. Terj. S. Gunawan. Jakarta: Bharatara Karya Aksara.
- Jailani, Anton Timur. 1985. "The Background of Indonesia Nationalism". *Mizan*. no.1. Vol.II.
- Karim, Muhammad Abdul. 2003. "Pengaruh Islam Dalam Pembinaan Moral Bangsa di Indonesia: Telaah Akulturasi Budaya Islam – Indonesia" Disertasi S3. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 1986. "Peranan Islam dalam perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia". Tesis S2. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Koch, D. M. G. 1985. *Menuju Kemerdekaan Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia sampai 1942*. Terj. Abdoel Moeis. Jakarta: Yayasan Pemabangunan.

- Koeber, A. P. E. 1985. *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?*. Jakarta: PT Temprint.
- Masa Kini*, 20 Mei 1986.
- Mukayat. 1985. *Haji Agus Salim Karya dan Pegabdiannya*. Jakarta: Proyek Inven tarisasi dan Dokumentasi Sejarah National Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Murtopo, Ali. 1978. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Yayasan Proklamasi.
- Noer, Deliar. 1973. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Notosusanto, Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoeded Poesponegoro. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid V. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Penders, Chr. L. M. 1977. *Indonesia: Selected Documents on Colonialism and Natio nalism 1830-1942*. Queensland: Queeeensland University Press.
- Perwiranegara, Alamsyah Ratu. 1982. *Wilayah Kajian Agama di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Salam, Solichin. 1982. *Bung Karno Putra Fajar*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soeharto, Pitut. A, Zainal Ihsan. 1981. *Cahaya di Kegelapan Capita Selecta Kedua Boedi Oetomo dan Sarekat Islam*. Jakarta: Jaya sakti.
- Soeroto. 1961. *Indonesia di Tengah Dunia dari Abad ke Abad*. II. Jakarta: PT Jam batan.
- Suminto, H. Aqib. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Team Pembinaan Penatar dan Bahan-Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Garis-Garis Besar Haluan Negara*. Jakarta, 1978.
- Wertheim, W. F. 1956. *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*. Vol. II. Bandung: Sumur Bandung.